

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah berakhirnya perang dunia ke 2, Jepang memasuki babak baru dalam sejarah perkembangan negara tersebut. Sistem pertahanan dan keamanan Jepang yang semula dikontrol dan dijalankan penuh oleh kerajaan, pasca berakhirnya perang dunia ke 2 dimana Jepang menjadi pihak yang menderita kekalahan maka sistem pertahanan dan keamanannya secara langsung diambil alih oleh Amerika Serikat selaku pihak yang mengalahkan Jepang serta sebagai negara pemenang perang dunia ke 2. Sistem pertahanan dan keamanan Jepang dikontrol dan dikendalikan oleh Amerika Serikat melalui perjanjian kerja sama dan keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1951, dan mulai berlaku pada tanggal 28 April 1952 (The Historian of the U.S. Department of State).

Inti dari perjanjian ini adalah Amerika Serikat akan diberikan hak untuk menggunakan daerah dan fasilitas di Jepang guna dipergunakan bagi angkatan, darat, laut dan udaranya serta akan melindungi pertahanan dan keamanan Jepang apabila situasinya mengancam. Sistem pertahanan ini berlangsung selama beberapa dekade sejak dimulainya perang dingin hingga dekade 2000-an. Memasuki dekade 2010-an, Pemerintah Jepang mulai menyusun strategi pertahanan mereka yang baru dari yang semula hanya bersifat sistem pertahanan diri (self defense) yaitu sistem pertahanan yang hanya melindungi kawasan Jepang sendiri kini menjadi sistem pertahanan diri yang mampu untuk mengatasi gangguan pertahanan dan keamanan Jepang serta untuk menghadapi kekuatan militer yang ada di luar perbatasannya.

Kilas balik pada tanggal 29 September 2021, Jepang mengadakan pemilihan umum untuk memilih Presiden Partai Demokratik Liberal Jepang dan Perdana Menteri yang baru. Pemilihan umum ini diikuti oleh dua kandidat yang sama-sama kuat yaitu Fumio Kishida (mantan Menteri Luar Negeri Jepang) menghadapi Taro Kono (Menteri Reformasi Administrasi dan Reformasi Regulasi yang saat itu sedang menjabat). Hasilnya, pemilihan umum ini dimenangkan oleh Fumio Kishida yang juga secara langsung terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang yang baru. Setelah dilantik menjadi Perdana Menteri yang baru, Fumio Kishida menegaskan tentang pentingnya memetakan serta menentukan lanskap geopolitik global yang semakin dinamis, menyusun strategi baru untuk mengatasi ancaman keamanan Jepang (Nakano, 2021).

Perdana Menteri Kishida juga menaruh perhatian besar kepada kebijakan luar negeri yaitu Jepang yang harus berpartisipasi lebih aktif dalam pertahanan kolektif dan memproyeksikan kekuatan untuk bertahan ataupun untuk menyerang ancaman yang ada di luar perbatasan negaranya. Hingga pada puncaknya yaitu pada tanggal 16 Desember 2022 Pemerintah Jepang menyetujui *Three Policy Document* atau Tiga Dokumen Kebijakan baru yaitu: Strategi Keamanan Nasional (*National Security Strategy*), Strategi Pertahanan Nasional (*National Defense Strategy*), dan Program Pembangunan Pertahanan (*Defense Buildup Program*) Jepang yang mengusulkan perluasan kemampuan militer Jepang secara signifikan serta peningkatan anggaran militer Jepang selama lima tahun (Yuan, 2023).

Peningkatan belanja militer dan perluasan kemampuan mencerminkan pergeseran signifikan dalam strategi keamanan Jepang yang memungkinkan negara ini untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pertahanan diri kolektif serta diharapkan untuk mampu menghadapi kekuatan militer yang ada di luar perbatasannya. Di bawah Perdana Menteri Fumio Kishida, Jepang telah memulai pembangunan militer yang signifikan, hal ini juga menandai perluasan kekuatan militer yang paling ambisius dan cepat sejak pembentukan

Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) pada tahun 1954. Pembangunan itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Jepang dalam menangkal agresi dan memastikan JSDF siap untuk bertempur jika terjadi konflik.

Aspek-aspek utama dari pengembangan militer Jepang selama era Kishida meliputi: Prospek Peningkatan belanja militer: anggaran pertahanan Jepang telah ditingkatkan, dengan rencana untuk menggandakan belanja pertahanan dari yang semula hanya 1.07% dari PDB di tahun 2021 menjadi 2% dari PDB pada tahun 2027 (Liang & Tian, 2023); Membeli dan membangun persenjataan militer yang baru: Jepang berencana untuk membeli persenjataan militer yang baru, seperti pesawat tempur, rudal, drone, pesawat tempur siluman, serta memperkuat kehadiran militernya di pulau-pulau mereka yang terletak di wilayah selatan Jepang; Kemampuan serangan balik: Jepang merencanakan strategi agar mereka mampu untuk melakukan serangan balik untuk mengurangi risiko serangan bersenjata langsung oleh terhadap negara itu; Perang siber dan operasi ruang angkasa: Jepang akan menghabiskan sekitar \$22 miliar untuk operasi perang siber dan \$14 miliar untuk operasi ruang angkasa. Pusat komando gabungan: Jepang akan mendirikan pusat komando gabungan pertamanya yang digunakan untuk mengkoordinasikan pasukan udara, laut, dan darat agar berjalan dengan lebih baik. Depot amunisi: Jepang berencana untuk membangun sekitar 70 gudang amunisi dalam waktu lima tahun dan 130 gudang amunisi pada tahun 2035 untuk mengatasi kekhawatiran tentang jumlah amunisi dan masalah suku cadang persenjataan mereka (Smith, 2022).

Pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh Jepang ini telah menarik perhatian dunia internasional. Progres pembangunan dari yang masih berupa dokumen kebijakan hingga kini telah masuk ke dalam proses pembuatan atau produksi persenjataan berlangsung secara masif dan dapat diketahui oleh publik. Pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh Jepang juga berdampak terhadap

keamanan regional Asia Timur dimana di kawasan ini terdapat negara seperti China, Korea Selatan, Korea Utara dan Taiwan, keterlibatan diplomatik dari Jepang, serta hubungan bilateral maupun multilateral Jepang dengan negara lain atau dengan negara mitra atau sekutu mereka (Yuan, 2023).

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Descenda Angelica Putri (2023) tentang Kebijakan Luar Negeri Jepang. Descenda Angelica Putri memfokuskan penelitian Kebijakan Luar Negeri Jepang pada tahun 2021 menggunakan konsep Kepentingan Nasional. Penelitian ini menggunakan Metodologi Kuantitatif dan Teori Kepentingan Nasional. Hasil dari penelitian ini adalah analisis berupa perjanjian kerjasama militer dan ekonomi yang dilakukan guna menghadapi China dan Korea Utara. Namun penelitian ini hanya terbatas pada penggunaan kepentingan nasional untuk Kebijakan Luar Negeri Jepang.

Penelitian kedua oleh RR Zahroh Hayati Azizah, Yoedhi Swastanto, dan Beni Rudiawan (2023) tentang Kepentingan Nasional serta Kerja Sama Pertahanan Indonesia dan Jepang di Kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan teori : *Regional Security Complexity* dan *National Interest*. Hasil penelitian ini adalah Analisis tentang Pelaksanaan kerja sama pertahanan Indonesia dan Jepang di kawasan Indo-Pasifik dilakukan berdasarkan Memorandum antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Jepang tentang Kerja Sama dan Pertukaran di Sektor Pertahanan pada tahun 2015. Namun penelitian ini hanya terbatas pada penggunaan kepentingan nasional untuk Kerjasama Pertahanan Jepang dengan Indonesia di Asia Pasifik.

Penelitian ketiga oleh Ananda F Ayu (2015) tentang Upaya Jepang Dibawah Pemerintahan Shinzo Abe Dalam Meningkatkan Pertahanan Militer. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan teori konsep *Dynamic Defense Force*. Hasil dari penelitian ini adalah analisis tentang Kebijakan Peningkatan Militer Jepang pada masa pemerintahan PM Shinzo Abe (2012 - 2014) adalah dengan menggunakan konsep *Dynamic*

Defense Force. Namun penelitian ini hanya terbatas pada penggunaan konsep *Dynamic Defense Force*. Sedangkan penelitian saya berfokus pada Kebijakan Luar Negeri Jepang era Perdana Menteri Fumio Kishida pada tahun 2021 - 2023 yang dianalisis menggunakan konsep motif *Security Dilemma*. Belum terdapat penelitian sebelumnya yang membahas Kebijakan Luar Negeri Jepang pada tahun 2021 – 2023 menggunakan konsep *Security Dilemma*.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Jepang melakukan motif pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan pemerintahan pada masa Perdana Menteri Fumio Kishida 2021 – 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis motif Jepang melakukan pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida 2021 – 2023?

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Level Analisis Tingkat Sistem dalam Hubungan Internasional

Level of Analysis atau Tingkatan Analisis adalah komponen yang akan dihadapi peneliti ketika mereka berusaha untuk membangun sebuah analisis. Peneliti membutuhkan metode seperti itu dikarenakan banyaknya aspek yang meliputi tema, aktor, isu dan permasalahan yang akan peneliti hadapi. Dalam Hubungan Internasional, pembahasan mengenai aspek-aspek tersebut dapat berkembang menjadi lebih kompleks. Jika tidak memisahkan atau mengelompokkan beragam aspek tersebut, akan menjadi tugas yang berat bagi peneliti untuk memahami menggunakan sebuah teori dan memberikan jawaban yang masuk akal terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Karena itu, peneliti menggunakan level analisis untuk memfokuskan penelitian (Gebhard, 2022).

Terdapat empat tingkat analisis dalam Hubungan Internasional yaitu:

Tingkat Sistem: terdiri dari sistem global secara keseluruhan dan melihat isu-isu seperti distribusi kekuasaan politik, sistem ekonomi, tata kelola global (organisasi internasional, hukum dan norma), dan difusi teknologi. Hal terpenting dari pendekatan ini juga mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang memaksakan diri mereka secara struktural pada tingkat-tingkat lainnya. Tingkat Negara: melihat negara-bangsa sebagai aktor dalam seperangkat kondisi eksternal tertentu, dan aktor dengan karakteristik internal tertentu (seperti apakah mereka negara demokrasi atau apakah mereka besar atau kecil) dan mempertimbangkan posisi strategis dan ekonomi mereka (Gebhard, 2022).

Tingkat Kelompok: melihat para aktor dalam konteks sosial, organisasi, profesional, dan birokrasi mereka, dan menunjuk pada cara mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka. Contohnya adalah para pengambil keputusan politik dalam konteks struktur pemerintahan seperti partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok-kelompok kepentingan yang bertindak di persimpangan antara pemerintah dan masyarakat. Tingkat

Individu: melihat perilaku dan keputusan orang-orang baik dalam peran pemerintah maupun non-pemerintah, memeriksa keyakinan, ketakutan, dan kepribadian mereka (Gebhard, 2022).

Penulis menggunakan *Level of Analysis* atau Tingkatan Analisis Tingkat Sistem untuk melihat tingkatan analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus kepada sistem internasional yang mengakibatkan terjadinya Dilema Keamanan terhadap Jepang.

1.4.2 Konsep *Security Dilemma*

Suatu teori di bidang ilmu hubungan internasional kita menyebutnya sebagai Dilema Keamanan adalah teori yang menjelaskan alasan terjadinya sebuah konflik dalam mencapai perdamaian dunia serta mengenai stabilitas keamanan jangka panjang antarnegara. Kenneth Waltz, menekankan bahwa *Security Dilemma* atau Dilema Keamanan adalah "bagaimana tindakan bertujuan untuk mempertahankan diri yang dilakukan oleh satu negara dapat dianggap sebagai ancaman oleh negara lain, yang mengarah pada kondisi ketidakamanan dan rentan munculnya potensi konflik" (Glacer, 1997).

Motif dibalik dilema keamanan didorong oleh keinginan negara untuk memaksimalkan kekuatan keamanannya. Sedangkan, dilema keamanan bukan hanya semata-mata tentang niat jahat atau perbuatan agresif suatu negara terhadap negara lain. Tindakan agresif tidak selalu dilakukan karena niat atau motivasi jahat untuk berbuat agresif. Sebaliknya, hal itu bisa terjadi merupakan inisiatif tindakan suatu negara yang dilakukan untuk meningkatkan keamanannya sendiri. Pada gilirannya tindakan agresif ini menyebabkan timbulnya reaksi dari negara lain yang mengarah soal menurunnya kondisi keamanan negara yang bereaksi dikarenakan ketidakmampuan negara untuk menandingi peningkatan kekuatan pertahanan dan keamanan negara rival (Glacer, 1997).

Berbagai definisi dan penjabaran Jervis menekankan tujuh aspek dilema keamanan: (1) dilema keamanan bersifat struktural; (2) ketidakpastian dan ketakutan negara-negara

tentang niat masing-masing negara di masa kini dan masa depan sangat penting dalam membentuk dan mempertahankan dilema keamanan; (3) hal itu disebabkan oleh tindakan defensif, sehingga tidak disengaja; (4) cenderung menghasilkan hasil yang tidak diinginkan dan merugikan diri sendiri-yaitu penurunan keamanan sendiri; (5) cenderung menghasilkan hasil yang tidak diinginkan dan tragis-yaitu perang; (6) dilema keamanan dapat menyebabkan perang, tetapi bukan penyebab semua perang; dan (7) dinamika dilema keamanan bersifat memperkuat diri sendiri dan menyerupai spiral (Tang, 2009). Selain menekankan ketujuh aspek dilema keamanan tersebut, Jervis juga memberikan kontribusi mendasar lainnya: tingkat keparahan dilema keamanan dapat diatur oleh faktor fisik/material (misalnya, teknologi, geografi) dan faktor psikologis/persepsi (misalnya, kesalahan persepsi) (Tang, 2009).

Robert Jervis mendefinisikan faktor geografis dalam hubungan internasional sebagai ciri-ciri fisik suatu wilayah atau negara yang dapat memengaruhi posisi strategis, kemampuan pertahanan, dan interaksinya dengan negara lain. Faktor-faktor ini termasuk lautan, gunung, sungai, dan penghalang alami lainnya, serta distribusi sumber daya dan akses ke lokasi-lokasi strategis utama. Jervis menekankan bahwa faktor geografis memainkan peran penting dalam membentuk keseimbangan serangan-pertahanan antar negara. Misalnya, jika dua negara berbagi perbatasan pegunungan yang sulit dilintasi, pertahanan akan memiliki keuntungan dalam konflik apa pun di antara negara-negara itu. Di ruang angkasa, geografi bersama dari semua negara sama-sama memengaruhi keseimbangan serangan-pertahanan. Namun, akses ke lokasi peluncuran di dekat khatulistiwa, yang memungkinkan massa yang lebih besar untuk mencapai orbit geosinkron dengan massa bahan bakar tertentu, mungkin menguntungkan beberapa negara di atas yang lain, tetapi perbedaan ini tidak cukup signifikan untuk memengaruhi keseimbangan kekuatan militer di ruang angkasa di antara negara-negara besar (Jervis, 1978).

Faktor teknologi berdampak pada dilema keamanan dengan mempengaruhi keseimbangan serangan-pertahanan dan diferensiasi serangan-pertahanan. Robert Jervis berpendapat bahwa perubahan teknologi dapat menggeser keseimbangan kekuatan antara penyerang dan pembela, sehingga lebih sulit bagi negara untuk mempertahankan lingkungan keamanan yang stabil. Misalnya, kemajuan dalam teknologi militer dapat memberikan keuntungan ofensif, sementara sistem keamanan baru dapat meningkatkan kemampuan defensif. Jervis berpendapat bahwa dilema keamanan akan semakin intens ketika keseimbangan ofensif-pertahanan dalam sistem politik internasional condong ke arah ofensif, karena hal ini menciptakan situasi di mana negara-negara merasa terdorong untuk membangun kemampuan militer mereka untuk tujuan pertahanan, tetapi tindakan ini dapat dianggap ofensif oleh pihak lain, yang berpotensi mengarah pada tindakan agresif. Jervis juga mencatat bahwa dilema keamanan dapat menyebabkan perlombaan senjata dan pembentukan aliansi, dengan negara-negara membangun kemampuan militer mereka untuk tujuan pertahanan tetapi dianggap ofensif oleh pihak lain, yang berpotensi mengarah pada tindakan agresif (Jervis, 1978).

1.5 Sintesa Pemikiran

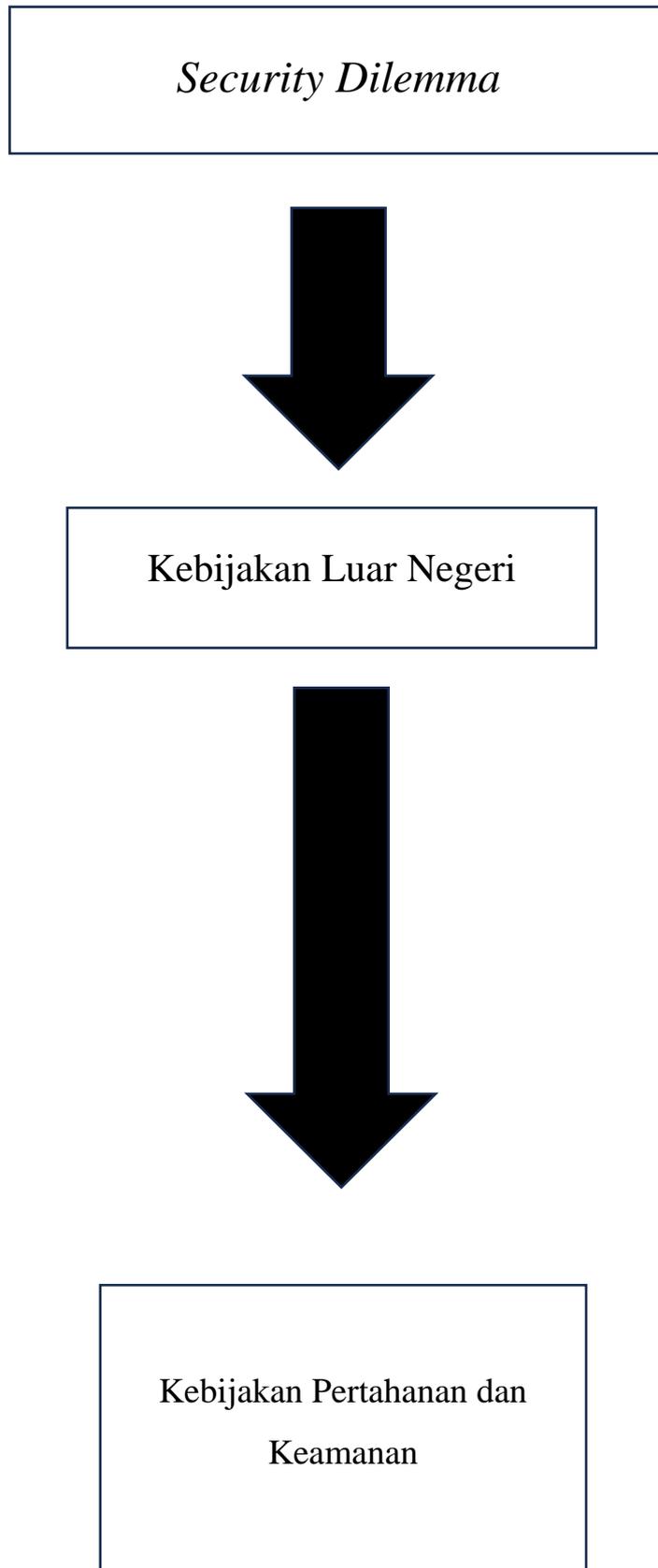


Diagram ini menjelaskan tentang konsep *Security Dilemma* yang dialami suatu negara menyebabkan negara harus mengubah kebijakan luar negerinya untuk menghadapi situasi yang terjadi. Perubahan kebijakan luar negeri tersebut lantas menghasilkan sebuah kebijakan baru yang akan digunakan untuk menghadapi *Security Dilemma* yang terjadi.

1.6 Argumen Utama

Jepang mengalami situasi dilema keamanan atau *security dilemma* dikarenakan negara tetangga yaitu : China dan Korea Utara meningkatkan aktivitas militernya dalam beberapa tahun terakhir khususnya tahun 2021 hingga tahun 2023. Dilema Keamanan ini semakin diperkuat oleh kedekatan faktor geografis, faktor teknologi dan faktor psikologi antar ketiga negara yang telah menyebabkan masalah keamanan dan pertahanan selama bertahun tahun. Kedekatan faktor geografis jarak batas antar negara yang sangat dekat, faktor teknologi berupa sistem persenjataan yang semakin maju inilah yang membuat aktivitas militer masing masing negara akan sangat mudah untuk diketahui dan dipantau serta dapat menimbulkan dampak berupa faktor psikologi yang akan langsung dirasakan oleh masing masing negara khususnya terhadap Masyarakat Jepang. Situasi ini menyebabkan Pemerintah Jepang yang diwakili oleh Perdana Menteri Fumio Kishida menyatakan akan menghadapi situasi ini secara khusus dan tegas dalam rangka memberikan rasa aman terhadap warga negara Jepang.

Jepang merespon aktivitas militer kedua negara atau dilema keamanan tersebut dengan mengubah kebijakan luar negerinya melalui peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan setelah disahkannya *Three Policy Document* atau Tiga Dokumen Kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan bagi Jepang untuk mulai membangun kekuatan pertahanan dan keamanan berupa peralatan persenjataan seperti : kapal perang,

pesawat tempur, kendaraan lapis baja dan sebagainya. Sebagai jawaban atas *Security Dilemma* yang sedang mereka rasakan saat ini.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatori karena bertujuan untuk menjelaskan motif Pembangunan Kekuatan Pertahanan dan Keamanan Jepang Pada Masa Pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida 2021 – 2023. Dalam tipe penelitian ini, akan ditemukan mengapa suatu peristiwa terjadi melalui pembentukan hubungan sebab-akibat dan berupaya untuk menganalisis fakt or motif Pembangunan Kekuatan Pertahanan dan Keamanan Pada Masa Pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida 2021 – 2023 menggunakan konsep *Security Dilemma*.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah pada tahun 2021 hingga 2023. Tahun 2021 dipilih karena di tahun ini adalah tahun transisi dimana ketika Jepang masih menggunakan kebijakan luar negeri era Perdana Menteri Yoshihide Suga (sebelum kebijakan luar negeri *Three Policy Document* dirilis dan disetujui) hingga tepatnya bulan Desember 2021, Pemerintah Jepang menyetujui *Three Policy Document* atau Tiga Dokumen Kebijakan Baru yang mana hal tersebut menjadi landasan pedoman dimulainya pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan jepang. Tahun 2023 dipilih karena penulis menetapkan batasan penelitian hingga akhir tahun dan penulis melakukan penelitian tersebut di tahun ini.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari buku, jurnal, artikel, serta website resmi institusi/pemerintahan dan website berita yang kredibel. Data dari sumber tersebut akan digunakan sebagai referensi utama dan bahan analisis dalam proses penelitian.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan oleh penulis untuk menganalisis data non-numerik atau non-angka yang terdiri dari kalimat, paragraf, dan halaman sumber atau referensi yang kita gunakan. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif tentang perilaku dan kata-kata tertulis atau lisan individu. Penelitian kualitatif menghasilkan desain yang terus menerus beradaptasi dengan realitas lapangan, tanpa harus bergantung pada desain sebelumnya yang telah disiapkan secara formal dan tidak dapat diubah (Hikmat, 2011:37-38).

1.7.5 Sistematika Penulisan

1. **BAB I** Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sintesa Pemikiran, dan Metodologi Penelitian yang meliputi; Tipe Penelitian, Jangkauan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, serta Sistematika Penulisan.
2. **Bab II** Peneliti akan memaparkan faktor faktor penyebab dilema keamanan yang disebabkan oleh China dan Korea Utara berdasarkan Konsep *Security Dilemma* oleh Robert Jervis yaitu Faktor Teknologi, Faktor Geografi dan Faktor Psikologi.
3. **Bab III** Peneliti akan menganalisis Faktor dan Kondisi *Security Dilemma* yang telah dipaparkan sebelumnya di Bab II yang mampu membuat Jepang sampai harus

mengubah kebijakan luar negeri hingga ditetapkannya tiga dokumen kebijakan atau *Three Policy Document* sebagai akibat situasi dilema keamanan yang mereka hadapi. Penggunaan Konsep *Security Dilemma* digunakan untuk menganalisis faktor dan alasan yang membuat kebijakan luar negeri Jepang pada masa pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida membangun kembali kekuatan pertahanan dan keamanan.

4. **BAB IV** berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai keseluruhan penelitian dan analisis yang telah dilakukan berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah diteliti.